

LKJIP

LAPORAN KINEJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATE DEMAK**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “*good governance*” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 024, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Demak, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 197106021992031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dengan Visi sebagaimana Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu “DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA”.

Misi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya misi ke 1 (satu) yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya” dan misi ke 3 (tiga) yaitu “Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.

Pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 tujuan yang akan dicapai guna mewujudkan misi ke 1 (satu) dan misi ke 3 (tiga) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 adalah: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3) Meningkatkan penanaman modal daerah, Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1) Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif 2) Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3) Meningkatnya Nilai Investasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) tujuan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, disimpulkan

bahwa seluruh indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal tercapai 100,02%, Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai 116,28%, Rata-Rata Lama Pengurusan Perizinan Berusaha tercapai 100,00%, Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercapai 100,00%, Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target tercapai 100,00%, Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA tercapai 117,66%, Persentase Peningkatan Investasi tercapai 575,00%.

Dalam mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, telah melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.363.522.200,00, Anggaran bersumber dari dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp6.779.639.200,00 dan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp583.883.000,00 terealisasi sebesar Rp7.243.969.710,00 atau 98,38%.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja adalah:

1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan kepada masyarakat
2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya
3. Bimbingan teknis implementasi perizinan usaha berbasis risiko dan implementasi pengawasan berusaha berbasis risiko serta Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Beberapa hal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tujuan/ sasaran strategis antara lain:

1. Masih terbatasnya potensi investasi yang ada
2. Masih terbatasnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal
4. Belum optimalnya pengolahan dan penyajian data penanaman modal

Strategi/upaya yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja adalah:

1. Mengoptimalkan potensi investasi yang ada
2. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan promosi penanaman modal
4. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian data penanaman modal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Struktur Organisasi.....	11
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	12
1.3 Isu-Isu Strategis	13
1.4 Kepegawaian	15
1.5 Sarana dan prasarana.....	16
1.6 Keuangan.....	26
1.7 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP	27
1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Perencanaan Strategis.....	30
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	30
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
2.1.3 Strategi, program dan Kegiatan.....	34
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	37
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	39
2.4 Perjanjian Kinerja	40
2.5 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024.....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	45
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	45
3.2 Analisis kinerja sasaran strategis.....	47
3.3 Realisasi Anggaran.....	98
3.4 Inovasi DPMPTSP Kabupaten Demak	102
BAB IV PENUTUP	104
A. Simpulan	104
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pusat Layanan Informasi/ Help Desk	17
Gambar 1. 2 Counter Layanan DPMPTSP Kab. Demak.....	17
Gambar 1. 3 Ruang Tunggu	18
Gambar 1. 4 Ruang Layanan Pengaduan	18
Gambar 1. 5 Kotak Saran/ Aduan	18
Gambar 1. 6 Ruang Transit Tamu	19
Gambar 1. 7 Ruang Rapat.....	19
Gambar 1. 8 Ruang Arsip.....	19
Gambar 1. 9 Ruang Laktasi/ Menyusui	20
Gambar 1. 10 Perpustakaan Digital	20
Gambar 1. 11 Pojok Baca.....	21
Gambar 1. 12 Tempat Bermain Anak.....	21
Gambar 1. 13 Terminal Charging HP	22
Gambar 1. 14 Monitor Informasi DPMPTSP Kab. Demak	22
Gambar 1. 15 Mesin Antrian	23
Gambar 1. 16 Mesin Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	23
Gambar 1. 17 Ruang Server	23
Gambar 1. 18 Kamera Pengawas / CCTV	24
Gambar 1. 19 Monitor Antrian Counter.....	24
Gambar 1. 20 Pojok UMKM	24
Gambar 1. 21 Parkir Difabel.....	25
Gambar 1. 22 Jalur Difabel.....	25
Gambar 1. 23 Fasilitas Kursi Roda	26
Gambar 1. 24 Toilet Difabel.....	26
Gambar 1. 25 Kursi Prioritas Layanan.....	26

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin.....	15
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.....	16
Tabel 1.3	Sumber Daya Asset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.....	16
Tabel 1.4	Matriks tindak lanjut penilaian LHE SAKIP Tahun 2024.....	28
Tabel 2.1	Strategi, program dan kegiatan	35
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab. Demak.....	38
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2024).....	39
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	40
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	41
Tabel 2.6	Rencana Anggaran per Sasaran Strategis TA 2024	42
Tabel 2.7	Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024..	43
Tabel 2.8	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator persentase peningkatan investasi	73
Tabel 3. 1	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja.....	45
Tabel 3. 2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	46
Tabel 3. 3	Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha.....	47
Tabel 3. 4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Penunjang Indeks Kepuasan Masyarakat	50
Tabel 3. 5	Program dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.	50
Tabel 3. 6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.....	51
Tabel 3. 7	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	52
Tabel 3. 8	Capaian kinerja Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif.....	53
Tabel 3. 9	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Persentase Keluhan Masyarakat	

yang ditindak lanjuti dan rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha.....	54
Tabel 3. 10 Program dan Anggaran Indikator Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dan Rata-rata lama Pengurusan perizinan berusaha.....	54
Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Indikator Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dan Rata-rata lama Pengurusan perizinan berusaha.....	56
Tabel 3.12 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dan Rata-rata lama Pengurusan perizinan berusaha.....	58
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu....	59
Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60
Tabel 3.15 Program dan Anggaran Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	61
Tabel 3.16 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	61
Tabel 3.17 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Nilai SAKIP DPMPTSP	62
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP.....	63
Tabel 3.19 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP yang mencapai target	64
Tabel 3.20 Program dan Anggaran Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP yang mencapai target	65
Tabel 3.21 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP yang mencapai target	65
Tabel 3.22 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP yang mencapai target.....	66

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Tujuan 3: Meningkatkan Penanaman Modal Daerah.....	67
Tabel 3.24 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	68
Tabel 3.25 Program dan Anggaran Indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA.....	68
Tabel 3.26 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Meningkatkan penanaman modal daerah.....	70
Tabel 3.27 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Persentase Indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA.....	71
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Nilai Investasi	72
Tabel 3.29 Program dan Anggaran Indikator Persentase Peningkatan Investasi	74
Tabel 3.30 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Meningkatkan penanaman modal daerah.....	75
Tabel 3.31 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Persentase peningkatan nilai investasi.....	77
Tabel 3.32 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Seluruh Tujuan dan Sasaran ..	78
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	80
Tabel 3.37 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	93
Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Tahun 2024	99

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

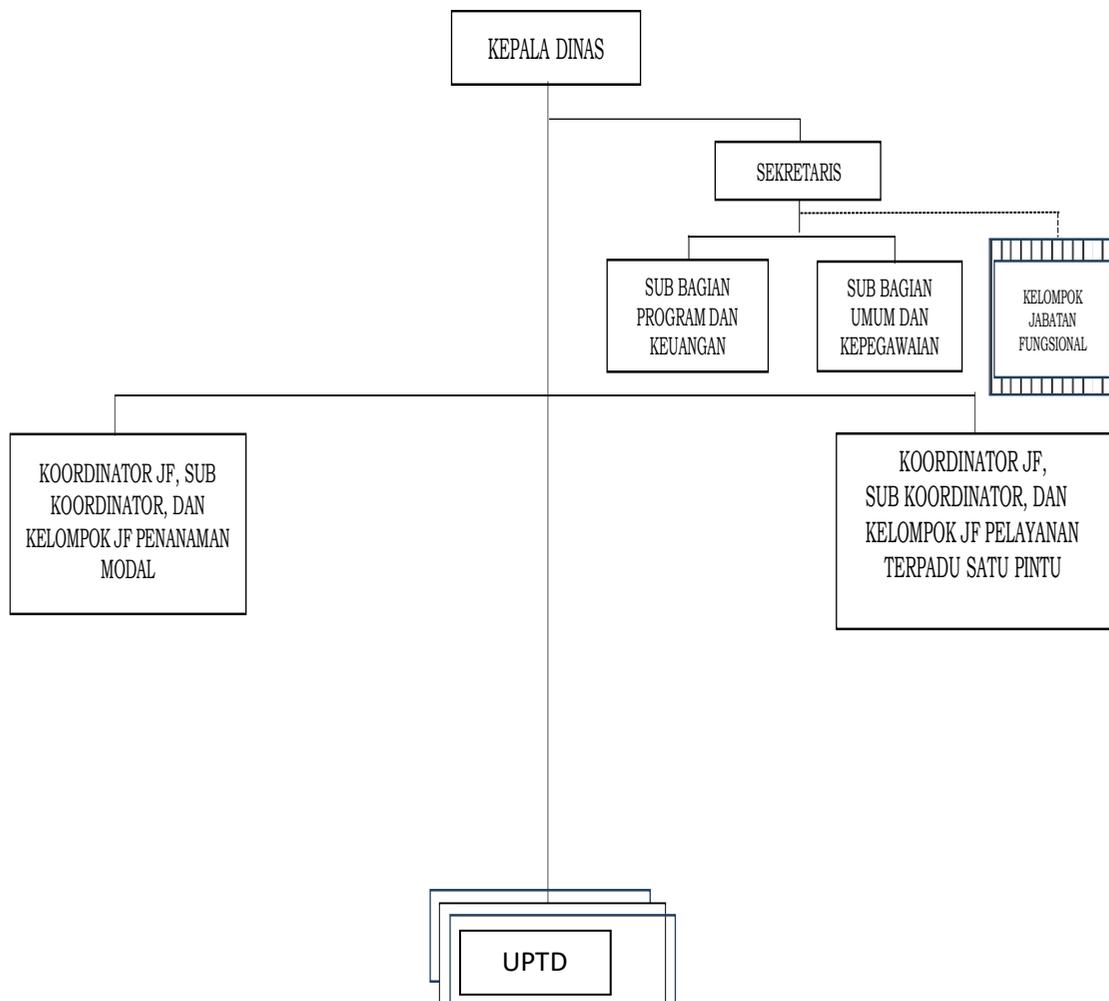
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak beralamat di Jl. Kyai Jebat Nomor 29 Demak nomor telepon (0291) 681011 / fax (0291) 681644. Susunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok JF Penanaman Modal;
- d. Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Demak, tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan, Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

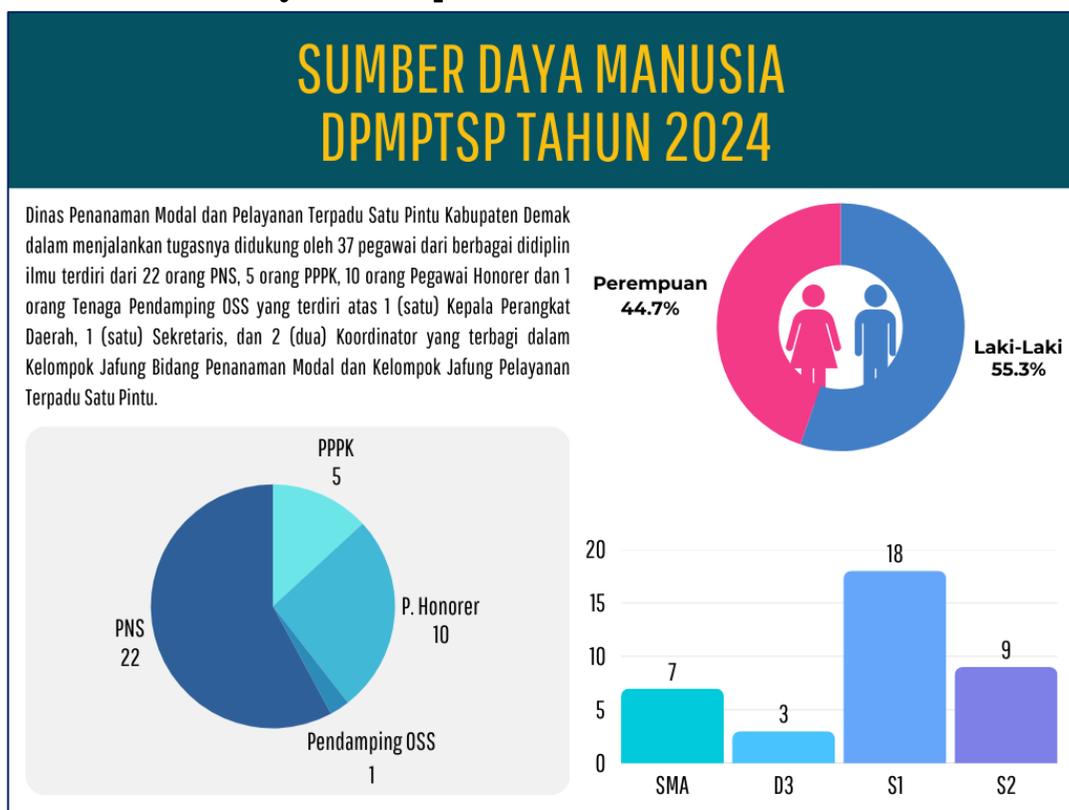
Beberapa Isu-isu penting penyelenggaraan yang dihadapi terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya potensi investasi yang ada;
Kegiatan yang mendukung tersedianya Potensi investasi dalam satu tahun hanya satu kali kegiatan, sehingga potensi investasi yang ada belum semuanya tersajikan dengan baik dalam bentuk buku/dokumen.
- b) Masih terbatasnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan oleh bidang pengendalian, pengawasan dan penindakan secara berkala namun karena keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia sehingga pelaksanaannya belum maksimal.
- c) Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal;
Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan mengikuti kegiatan pameran di tingkat lokal, regional dan nasional yang masing – masing direncanakan satu kali keikutsertaan setiap tahun, tetapi dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas tidak dapat mengikuti sesuai yang direncanakan setiap tahun.
- d) Belum optimalnya pengolahan dan penyajian data penanaman modal;
Dengan adanya peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, maka pengembangan secara terus menerus system teknologi informasi pengelolaan dan penyajian data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sangat dibutuhkan guna mewujudkan pengelolaan dan penyajian data dan informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan dan penyajian data penanaman modal serta sarana dan prasarana pendukung mengakibatkan kurang optimalnya pengolahan dan penyajian data penanaman modal.

1.4 Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas. Pada akhir tahun 2024 terdapat 38 pegawai yang terdiri dari 22 PNS, 5 pegawai PPPK, 10 pegawai honorer, 1 pegawai tenaga ahli/ pendamping OSS. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 55,26% (21 orang) dan sisanya sebanyak 44,74% merupakan pegawai perempuan (17 orang).

Gambar 1. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	PNS Golongan dan Jenis Kelamin							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala DPMPTSP	1							
2	Pejabat Struktural	1	1	1					
3	Fungsional Khusus	2	2	5	7				
4	Fungsional Umum			2	4	1			
Jumlah		4	3	8	11	1			

Sumber : Umpeg DPMPTSP Kabupaten Demak 2024

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin							
		S2		S1		D3		SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala DPMPTSP	1							
2	Pejabat Struktural	2	1						
3	Fungsional Khusus	3	2	4	7				
4	Fungsional Umum				3	2		1	1
Jumlah		6	3	4	10	2	-	1	1

Sumber : Umpeg DPMPTSP Kabupaten Demak 2024

1.5 Sarana dan prasarana

Terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sampai dengan akhir tahun 2024 sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Sumber Daya Asset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Alat Besar	unit	2	Baik
2.	Alat – alat Angkutan	Unit	20	Baik
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	1	Baik
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	buah	426	Baik
5.	Alat Studio, Komunikasi, Pemancar	buah	15	Baik
6.	Komputer	buah	177	Baik
7.	Bangunan Gedung	Unit	1	Baik
8.	Monumen	Unit	2	Baik
9.	Instalasi	Unit	1	Baik
10.	Jaringan	Unit	1	Baik
11.	Bahan Perpustakaan	buah	300	Baik

Sumber : Laporan Inventaris Barang Milik Daerah DPMPTSP Kabupaten Demak 2024

Dari sarana dan prasarana yang ada digunakan untuk pendukung operasional administrasi perkantoran dan pelayanan perizinan dan non pezinan diantaranya:



Gambar 1. 2 Pusat Layanan Informasi/ Help Desk

Pusat Layanan Informasi atau Help Desk adalah unit yang bertugas memberikan bantuan dan dukungan teknis serta informasi kepada pengguna layanan. Pusat Layanan Informasi atau Help Desk memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional sehari-hari sebuah organisasi. Dengan memberikan layanan yang cepat, akurat, dan berkualitas, Help Desk dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan pengguna, dan efisiensi organisasi secara keseluruhan.

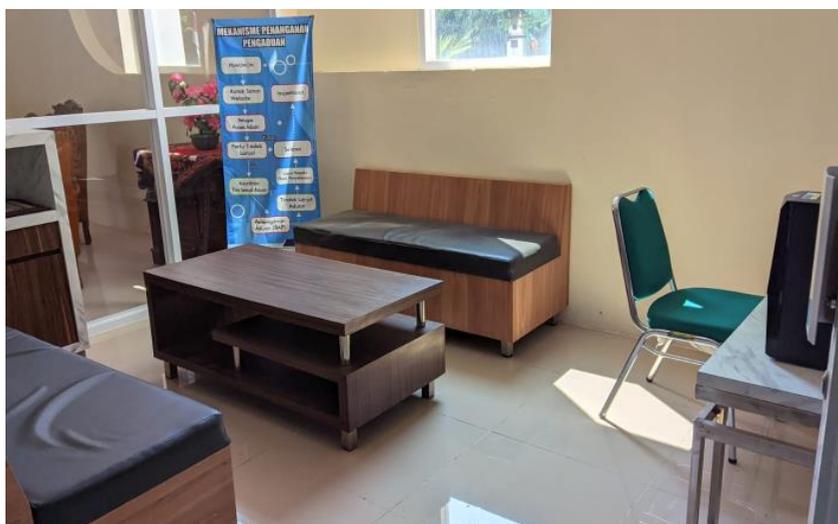


Gambar 1. 3 Counter Layanan DPMPPTSP Kab. Demak

Loket Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Fungsi utama dari loket pelayanan ini meliputi: Penerimaan dan verifikasi dokumen izin, informasi dan konsultasi pelayanan permohonan izin, penerbitan ID Billing Retribusi PBG.



Gambar 1. 4 Ruang Tunggu



Gambar 1. 5 Ruang Layanan Pengaduan



Gambar 1. 6 Kotak Saran/ Aduan



Gambar 1. 7 Ruang Transit Tamu



Gambar 1. 8 Ruang Rapat



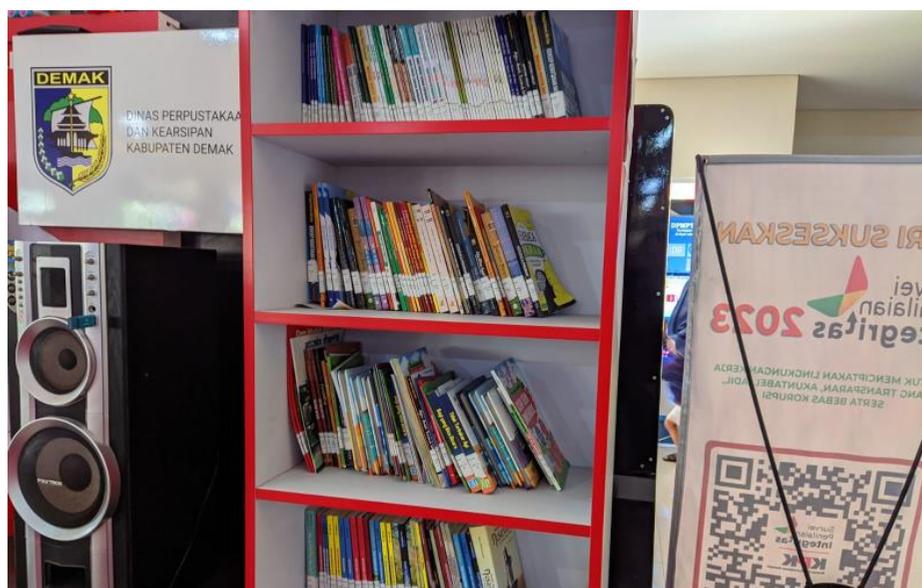
Gambar 1. 9 Ruang Arsip



Gambar 1. 10 Ruang Laktasi/ Menyusui

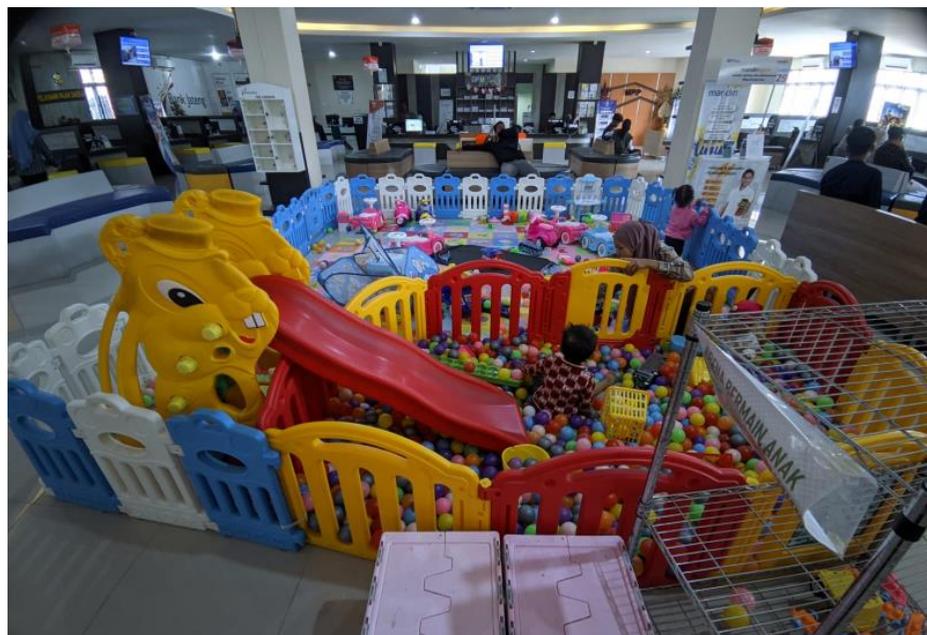


Gambar 1. 11 Perpustakaan Digital





Gambar 1. 12 Pojok Baca



Gambar 1. 13 Tempat Bermain Anak



Gambar 1. 14 Terminal Charging HP



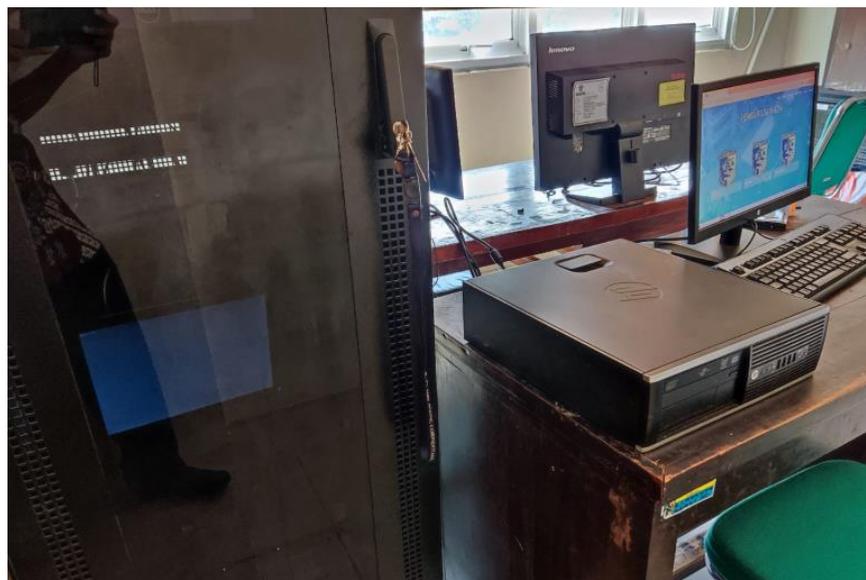
Gambar 1. 15 Monitor Informasi DPMP TSP Kab. Demak



Gambar 1. 16 Mesin Antrian



Gambar 1. 17 Mesin Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)



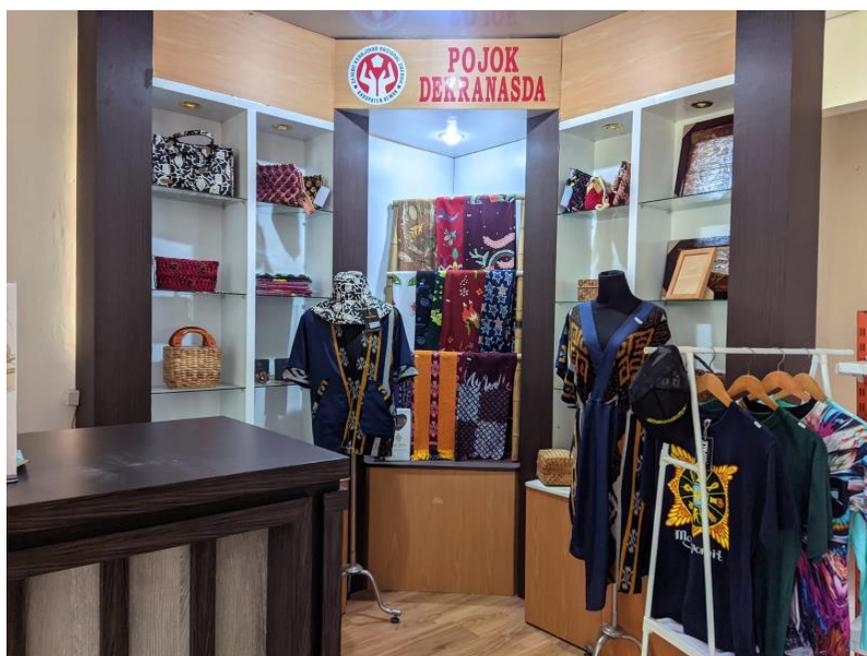
Gambar 1. 18 Ruang Server



Gambar 1. 19 Kamera Pengawas / CCTV



Gambar 1. 20 Monitor Antrian Counter



Gambar 1. 21 Pojok UMKM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menyediakan berbagai fasilitas difabel untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pemohon yang memiliki keterbatasan. Fasilitas yang tersedia meliputi parkir difabel, jalur difabel, kursi roda, toilet khusus difabel, dan kursi tunggu pemohon prioritas (orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas).



Gambar 1. 22 Parkir Difabel



Gambar 1. 23 Jalur Difabel



Gambar 1. 24 Fasilitas Kursi Roda



Gambar 1. 25 Toilet Difabel



Gambar 1. 26 Kursi Prioritas Layanan

1.6 Keuangan

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran diatas. Adapun total anggaran murni sebesar Rp6.631.504.364,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp6.494.052.364,00 dan belanja modal sebesar Rp137.452.000,00. Adapun anggaran setelah perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.732.017.836,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp.7.363.522.200,00 terdiri dari belana operasional sebesar Rp6.289.817.700,00 dan belanja modal sebesar Rp1.073.704.500,00. Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp6.779.639.200,00 dan DAK Non Fisik fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp583.883.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Ringkasan Anggaran Belanja Dpmpptsp Tahun 2024

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	6.494.052.364,00	6.289.817.700,00	(204.234.664,00)
Belanja Pegawai	4.161.997.864,00	3.494.015.700,00	(667.982.164,00)
Belanja Barang dan Jasa	2.332.054.500,00	2.795.802.000,00	463.747.500,00
Belanja Modal	137.452.000,00	1.073.704.500,00	936.252.500,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	137.452.000,00	853.368.500,00	715916.500,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangun	0,00	220.336.000,00	220.336.000,00
Jumlah	6.631.504.364,00	7.363.522.200,00	732.017.836,00

Sumber: DPMPTSP Tahun 2024, data diolah

1.7 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP

Berdasarkan surat Inspektur Daerah Kabupaten Demak Nomor 700/024/Wil III/Koi-Evaluasi/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024. Matriks tindak

lanjut penilaian LHE SAKIP Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Matriks tindak lanjut penilaian LHE SAKIP Tahun 2024

No	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Sub Komponen Kualitas/ Mutu Perencanaan Kinerja	Penyusunan kolom Rencana Hasil Kerja (RHK) dalam dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masih menyebutkan nomenklatur program/ kegiatan belum menyebutkan sasaran program/ kegiatan	Mencantumkan sasaran program/kegiatan dalam kolom Rencana Hasil Kerja (RHK) pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tindak lanjut: Seluruh ASN DPMPTSP telah mencantumkan sasaran program/ kegiatan dalam kolom Rencana Hasil Kerja (RHK) pada Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
2	Sub Komponen Kualitas/ Mutu Pemanfaatan Perencanaan Kinerja	DPMPTSP belum menyajikan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja	Menyajikan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja	Tindak lanjut: DPMPTSP telah menyajikan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja
3	Sub Komponen Kualitas/ Mutu Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja program program pelayanan modal belum jelas apakah memasukkan ketentuan perizinan yang diajukan melalui OSS atau tidak	Menetapkan SOP Pengukuran Kinerja untuk Program Pelayanan Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tindak lanjut: DPMPTSP telah menetapkan SOP Pengukuran Kinerja untuk Program Pelayanan Penanaman Modal

Sumber: DPMPTSP Tahun 2024, data diolah

1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif** 1 Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai

- tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
- 2 Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021–2026.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan hal yang ingin dicapai mengenai keadaan Kabupaten Demak pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (clarity of direction) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Demak dalam jangka menengah tersebut. Visi

Kabupaten Demak tahun 2021-2026 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu **“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**. Visi tersebut terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Dari tiga frase di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang

semakin maju, dan perekonomian masyarakat yang semakin sejahtera.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dimaksud terdiri dari 3 rumusan sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Penjabaran dari Misi Kabupaten Demak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya Dalam misi pertama terdapat dua frase kunci yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat. Dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan manajemen pembangunan yang sinergis dalam birokrasi. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif untuk mencapai tujuan Demak Bermartabat. Suasana kehidupan yang agamis, kondusif, dan berbudaya memungkinkan berbagai penyelenggaraan fungsi-fungsi publik tercapai. Dalam pelaksanaannya, kehidupan masyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya dapat pula mendukung

iklim investasi dan menyokong berjalannya roda perekonomian daerah.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing Dalam kalimat misi di atas ada dua frase kunci yang menjadi fokus pembangunan yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah karena manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana. Sedangkan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Kedua unsur tersebut merupakan dua hal yang saling memiliki keterkaitan. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu mengelola sumber daya alam dengan bijaksana sehingga tercipta lingkungan hidup yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan pada gilirannya turut mendorong kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran Dalam kalimat misi di atas dimaknai bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi yang perlu didorong sebagai basis ekonomi daerah yang kuat yang nantinya dapat mengentaskan kemiskinan. Potensi perekonomian Demak yang terbukti menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu industri pengolahan, pertanian, perikanan, perdagangan dan UMKM. Selain itu, Kabupaten Demak juga memiliki potensi pariwisata yang perlu digarap lebih serius demi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pemasaran produk-produk lokal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya **misi ke 1 (satu) yaitu**

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya” dan misi ke 3 (tiga) yaitu “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021, maka pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 tujuan yang akan dicapai guna mewujudkan misi ke 1 (satu) dan misi ke 3 (tiga) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Meningkatkan penanaman modal daerah.

b. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif;
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Meningkatnya Nilai Investasi.

2.1.3 Strategi, program dan Kegiatan

a. Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha merupakan strategi untuk mencapai sasaran

terwujudnya pelayanan publik yang responsif, guna mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha;

2. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, guna mewujudkan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peningkatan sistem teknologi informasi dan promosi investasi merupakan strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi, guna mewujudkan tujuan meningkatkan penanaman modal daerah.

b. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada Tahun 2024 dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Strategi, program dan kegiatan

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Kabupaten Demak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-KPD
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		2 Pengadaan Mebel	
		3 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
		4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	
		5 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		3 Pemeliharaan Mebel	
		4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
			1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan bersaha terintegrasi secara elektronik

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
		2 Pemantauan, Analisis, Evaluasi pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
		3 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Resiko
Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		1 Penyusunan peta potensi kabupaten/kota
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		1 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota
		1 Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan Usahanya
		2 Bimbingan Tehnis Kepada Pelaku Usaha
		3 Pengawasan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1 Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Nomor 050/14/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP Kab. Demak

No	Tujuan/ Sasaran Renstra	Tujuan/ Sasaran yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan penanaman modal	Hasil pengukuran survey pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 47 Tahun 2017	<i>Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang</i>	Mengukur kinerja organisasi tugas, fungsi dan peran organisasi di bidang penanaman modal
1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintah daerah	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh keluhan masyarakat yang masuk dikalikan seratus persen	$\frac{\text{Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh keluhan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	
			Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin dibagi jumlah izin yang terbit	$\frac{\text{Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin}}{\text{Jumlah izin yang terbit}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APiP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	<i>Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APiP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi</i>	Mengukur kinerja organisasi sesuai tugas, fungsi dan peran organisasi di bidang penanaman modal
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintah daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran strategis dikalikan seratus persen	$\frac{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja sasaran strategis}} \times 100\%$	
3	Meningkatkan penanaman modal daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun n	<i>Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun n</i>	
3.1	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Jumlah proyek investasi tahun n dikurangi jumlah proyek investasi tahun n-1 dibagi jumlah proyek investasi tahun n-1 dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah proyek investasi tahun n} - \text{jumlah proyek investasi tahun n} - 1}{\text{Jumlah proyek investasi tahun n} - 1} \times 100\%$	

2.3 Rencana Kerja Tahunan

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak sebagaimana RPJMD lainnya hanya berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai kepada Program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu penjabaran kegiatan. Perencanaan yang lebih detail tadi disebut dengan Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2024)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	87	
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	86	
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	Hari	3	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	80,96	
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	%	100	
3	Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Proyek	470	
	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,04	

Sumber: RKT DPMPTSP Kabupaten Demak 2024

2.4 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran PD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	89
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	86%
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	3 hari
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,96
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	100%
3	Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	470 Proyek
	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Investasi	0,04

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.617.684.864,00	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Investasi	Rp30.875.000,00	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp98.150.000,00	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp141.555.000,00	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp634.239.500,00	DAU dan DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp109.000000,00	DAU

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 tahun 2023 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran PD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	91
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	86%
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	1 Hari
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,40
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	100%
3	Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	1.750 Proyek
	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Investasi	0,04%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp6.324.702.700,00	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp30.875.000,00	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp98.150.000,00	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp141.555.000,00	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp634.239.500,00	DAU dan DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp134.000.000,00	DAU

Mencermati target perjanjian kinerja kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 guna mencapai tujuan dan sasaran diatas total anggaran murni sebesar Rp6.631.504.364,00 setelah perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp732.017.836,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp7.363.522.200,00.

Adanya Perjanjian Kinerja Perubahan pada tahun 2024 dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya tambahan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2024 tetntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Perubahan target kinerja tahun 2024 dan 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Target Kinerja Tahun 2024 Dan 2025, Serta Indikator Utama Pambangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 Nomor 050/0649.

2.5 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Jumlah anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak setelah perubahan sebesar Rp7.363.522.200,00.

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Strategis TA 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Rp2.677.018.500,00	36,36%
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp3.789239200,00	51,46%
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target		
3	Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Rp897.264.500,00	12,19%
	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Investasi		
Jumlah			Rp7.363.522.200,00	100,00%

Sumber: DPMPTSP 2024, data diolah

3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal Periode RENSTRA PD		Target Kinerja Tujuan / Sasaran		
				2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	85	87,86	85	87	89

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	Kondisi Awal Periode RENSTRA PD		Target Kinerja Tujuan / Sasaran		
				2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80	80	80	83	86
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	Hari	3	3	3	3	1
2	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	80,87	80,87	80,9	80,93	81,40
	Sasaran 2: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	%	86,9	85,71	100	100	100
3	Tujuan 3: Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Proyek	419	431	435	450	1.750
	Sasaran 3: Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,22	0,03	0,02	0,03	0,04

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Demak, data diolah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 Kabupaten Demak.

Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program, maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90%	Tinggi	
3	66 ≤ 75%	Sedang	
4	51 ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dengan cara pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Pada **indikator positif**, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Pada indikator negatif, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Nilai	91	91,02	100,02	Sangat Tinggi
2	Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	86	100	116,28	Sangat Tinggi
		Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan Berusaha	Hari	1	1	100,00	Sangat Tinggi
3	Tujuan 2 : Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	81,40	81,40	100,00	Sangat Tinggi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sasaran 2 : Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
5	Tujuan 3 : Meningkatnya Penanaman Modal Daerah	Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	Proyek	1.750	2.059	117,66	Sangat Tinggi
6	Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,04	0,23	575,00	Sangat Tinggi

Sumber: DPMPSTSP 2024, data diolah

3.2 Analisis kinerja sasaran strategis

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tahun 2024 sebagai berikut:

3.2.1 Capaian kinerja per sasaran strategis

1. Analisis kinerja Tujuan 1: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha”

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal mencapai **104,54%** dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	87,86	89,84	90,95	91	91,02	100,02	93,00	97,87

Perolehan hasil indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak di tahun 2024 sebesar 91,02. Jika dibandingkan dengan target nilai IKM senilai 91 maka diperoleh capaian sebesar 100,02% dan apabila dibandingkan dengan nilai IKM target akhir Renstra sebesar 93,00 maka diperoleh capaian 97,87% dengan predikat capaian “Sangat Tinggi”.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil survei IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan survei IKM tahun-tahun sebelumnya.

Motode yang digunakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan pendekatan método kualitatif dengan pengukuran *Skala Likert*. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur survei kepuasan masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dimana terdapat 9 unsur:

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian survei kepuasan masyarakat yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Merujuk pada rumus tersebut, perolehan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak di Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Jumlah responden dalam survei kepuasan masyarakat sebanyak 337 orang
- b. Nilai IKM Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah 91,02 dan mutu pelayanan termasuk kategori A dengan hasil kinerja pelayanan adalah **SANGAT BAIK**
- c. Unsur pelayanan yang masih mempunyai 3 (tiga) nilai terendah yaitu: waktu pelayanan, persyaratan pelayanan, produk, spesifikasi jenis pelayanan. Adapun rincian hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPSTP Tahun 2024



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Penunjang Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Nilai	91	91,02	100,02	1) Tidak ada pungutan pembayaran yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan; 2) Pengelolaan Sarana Dan Prasarana yang menunjang kenyamanan dalam pelayanan; 3) Responsibilitas dalam menangani pengaduan masyarakat, serta kemudahan akses pengaduan dan konsultasi layanan	1) Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai perizinan yang gratis, informasi disebarluaskan melalui website resmi, media sosial dan papan pengumuman; 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang menunjang kenyamanan dalam pelayanan; 3) Meningkatkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal dicapai melalui program dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Program dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.535.463.500,00	2.472.588.888,00	97,52%
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	141.555.000,00	138.530.606,00	97,86%
Jumlah		2.677.018.500,00	2.611.119.494,00	97,54%

Berdasarkan tabel diatas Tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal didukung oleh 2 (dua) program

dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.611.119.494,00 dari target anggaran sebesar Rp2.677.018.500,00 dengan capaian realisasi anggaran 97,54%.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	100,02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Sesuai standar Pelayanan	100%	Menunjang: Mencakup kegiatan administratif, teknis, dan operasional yang mendukung pelayanan;
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	56,30%	Menunjang: Dalam hal penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, dan kemudahan akses pelayanan bagi calon investor, serta memberikan informasi dan bantuan terkait kebijakan penanaman modal di daerah;

Sumber: DPMPSTSP 2024, data diolah

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar dengan target 6.750 ketentuan terealisasi 3.800 ketentuan atau tercapai 56,30%, Sumber data SIMPPT, SIINVEST, SIMBG, capaian yang kurang dari target dikarenakan banyak perizinan daerah yang beralih menggunakan OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS RBA pada tahun 2024 sebanyak 13.021. Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	91	91,02	100,02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.535.463.500	2.472.588.888	97,52%
							Program Pelayanan Penanaman Modal	141.555.000	138.530.606	97,86%
	Capaian					100,02	Jumlah	2.677.018.500	2.611.119.494	97,54%
TINGKAT EFISIENSI: 2,48										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 102,54										

Berdasarkan tabel diatas sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal memiliki tingkat efisiensi 2,48 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian anggaran ($100,02 - 97,54 = 2,48$) dan tingkat efektivitas 102,54 yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100 ($100,02/97,54*100 = 102,54$).

2. Analisis kinerja Sasaran 1: “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai **120,48%** dan termasuk predikat **“Sangat Tinggi”**, dan Indikator Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan Berusaha mencapai **100%** dan termasuk predikat **“Sangat Tinggi”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 8 Capaian kinerja Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80	100	100	86	100	116,28	95,00	105,26
Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan Berusaha	3	3	3	1	1	100,00	2	150,00

Keluhan masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keluhan ini memberikan wawasan tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam menyesuaikan dan memperbaiki layanan. Untuk menghitung persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti} = \left(\frac{\text{Jumlah Keluhan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keluhan yang Diterima}} \right) \times 100\%$$

Indikator rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi pelayanan publik terkait perizinan berusaha dan non berusaha. Dengan adanya sistem perizinan secara online proses penerbitan perizinan menjadi lebih cepat. Untuk menghitung rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha menggunakan rumus berikut:

Rata-rata Lama Pengurusan =

$$\frac{\text{Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin}}{\text{Jumlah izin yang terbit}} \times 100\%$$

Tabel 3. 9 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti dan rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	83	100	120,48	1) Aksebilitas saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui loket, media social, website, email, WA center 2) Responsibilitas dalam penanganan pengaduan dan konsultasi layanan	1) Peningkatan teknologi dan infrastruktur untuk saluran pengaduan 2) Optimalisasi tim khusus dalam menangani dan menindaklanjuti keluhan masyarakat
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	Hari	1	1	100,00	1) Implementasi sistem perizinan berbasis web yang memudahkan 2) Sumber daya manusia yang kompeten 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas 4) Koordinasi yang baik	1) Peningkatan infrastruktur teknologi 2) Pengembangan kompetensi pegawai 3) Optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 4) Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait

Tujuan 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator 1) Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti, 2) Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha dicapai melalui program dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Program dan Anggaran Indikator Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dan Rata-rata lama Pengurusan perizinan berusaha

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.535.463.500	2.472.588.888	97,52%
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	141.555.000	138.530.606	97,86%
Jumlah		2.677.018.500	2.611.119.494	97,54%

Berdasarkan tabel diatas sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Respondif dengan indikator 1) Persentase Keluhan Masyarakat yang

ditindaklanjuti, 2) Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha, didukung oleh 2 (dua) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.611.119.494,00 dari target anggaran sebesar Rp2.677.018.500,00 dengan capaian realisasi anggaran 97,54%.

Adapun deskripsi tentang program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota: Program ini bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang pelayanan.
- b. Program Program Pelayanan Penanaman Modal: program ini bertujuan untuk penyediaan layanan perizinan, penyediaan layanan konsultasi kepada pelaku usaha.

Dalam rangka mempercepat proses pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Demak telah menerapkan perizinan secara online pada sebagian perizinan melalui OSS-RBA merupakan sistem perizinan berusaha yang menilai permohonan perizinan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha dibangun berdasarkan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021, SI INVEST OKE untuk memberikan kemudahan bagi pemohon/investor karena dapat langsung mengakses untuk mengajukan permohonan dan mencetak izin secara mandiri bila sudah di TTE (Tanda Tangan Elektronik) oleh Kepala Dinas, untuk Sebagian izin masih menggunakan program Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang dibangun secara mandiri melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMPPT), program aplikasi dimaksud, sampai dengan saat ini sangat membantu petugas dalam melaksanakan mekanisme pelayanan secara cepat dan pasti, karena terintegrasi secara menyeluruh dari front office dengan bagian pemrosesan/back office.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tanggal Aduan	Keluhan/ Aduan	Tindak Lanjut Penyelesaian	Status
29 Februari 2024	Bagaimana solusi tidak bisa register akun SIP Perawat	Kemungkinan sudah pernah mendaftarkan akun, solusinya diresetkan password akun	Selesai
9 Maret 2024	Apakah web pendaftaran SPP-IRT baru? Sudah mendaftar selama 3 minggu belum ada konfirmasi	Pendaftaran SPP-IRT sudah tidak melalui website SI Invest, tetapi melalui OSS atau menggunakan formulir pendaftaran SPP-IRT	Selesai
14 Maret 2024	Kenapa tidak dapat membuka menu pencabutan SIP TTK di SI Invest?	Untuk menu pencabutan SIP TTK belum bisa karena aplikasi masih dalam pengembangan	Selesai
18 Maret 2024	Mohon Perbaiki, Mengajukan SIP Dokter Gigi di Puskesmas Wedung 1 tetapi kenapa di formulir di ganti Puskesmas Demak 3	Formular sudah diperbaiki	Selesai
19 April 2024	Mohon peninjauan ijin sekolah ditengah permukiman warga rumah sederhana	Sudah dilakukan cek lokasi oleh tim teknis PAUD Nabila. Untuk izin operasional PAUD Nabila yang beralamat di JL. Pucangsari III Batusari Kec. Mranggen dengan nomor SK: 421.11/955/2018 sudah habis masa berlakunya. Saran dari tim teknis untuk pengajuan perpanjangan izin operasional, sepanjang sesuai dengan persyaratan perizinan dan tidak adanya penyalahgunaan fungsi maka tidak ada peninjauan izin	Selesai
19 April 2024	Pemohon tidak bisa log in ke SI Invest dengan NIK 332105420789****	Sudah diberikan user dengan password baru yang telah di reset	Selesai
19 April 2024	Permohonan reset password an. Retno Minarsih	Sudah diberikan user dengan password baru yang telah di reset	Selesai
19 April 2024	Permohonan reset password an. Fatimatul Zahroh	Sudah diberikan user dengan password baru yang telah di reset	Selesai
19 April 2024	Mohon untuk pencabutan SIP secara online dan SIP yang kedua tetapi tidak ada fiturnya	Pencabutan langsung ke kantor DPMPSTSP Demak dengan membawa persyaratan	Selesai
24 Juli 2024	Konfirmasi terkait pembuatan akun/register di web SI Invest error. Sudah melakukan register selama 1 minggu dan tidak dapat di klik setelah mengisi identitas	Disarankan untuk refresh browser dan clear cache, sudah dibantu register oleh petugas	Selesai

Tanggal Aduan	Keluhan/ Aduan	Tindak Lanjut Penyelesaian	Status
24 Juli 2024	Keluhan website SI Invest error tidak bisa klik register	Disarankan untuk refresh browser dan clear cache, sudah dibantu register oleh petugas	Selesai
26 Juli 2024	Menanyakan SPPL terbitan DLH atau OSS? Di kantor PTSP melampirkan terbitan dari DLH dan sudah di legalisir tapi ditolak	Disebabkan legalisir sudah lama tahun 2021, sehingga disarankan untuk menggunakan SPPL terbitan OSS kemudian divalidasi oleh DLH	Selesai
11 November 2024	Perizinan usaha harapan kami proses harus lewat desa dulu, ada satu momen pengusaha tidak melalui desa namun langsung jadi tanpa melalui desa. Indikasi orang berduit. Harapannya dapat sesuai prosedur yang sudah ditetapkan	Berdasarkan PP No 5 tahun 2021 tentang cipta kerja dan PP No 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan peizinan berusaha melalui daerah, bahwa perizinan berusaha bisa diproses melalui OS RBA pada laman www.oss.go.id pelaku usaha dapat mendapatkan legalitas izin usahanya. Dan terdapat layanan pendampingan OSS di MPP Kab. Demak secara gratis/ tidak dikenakan biaya	

Tabel 3. 11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Indikator Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dan Rata-rata lama Pengurusan perizinan berusaha

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	120,48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	Menunjang: Sumber Daya Manusia yang memadai; Fasilitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan;
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	100,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	56,30%	Menunjang: Sistem/aplikasi perizinan online; Transparansi dan kemudahan pelayanan perizinan; Responsibilitas penanganan konsultasi dan pengaduan;

Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator 1) Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, 2) Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dan Rata-rata lama Pengurusan perizinan berusaha

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	86	100	116, 28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.535.463.500	2.472.588.888	97,52%
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	Hari	1	1	100, 00	Program Pelayanan Penanaman Modal	141.555.000	138.530.606	97,86%
		Capaian				108, 14	Jumlah	2.677.018.500	2.611.119.494	97,54%
TINGKAT EFISIENSI: 10,60										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 110,87										

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator 1) Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, 2) Rata - rata lama pengurusan perizinan memiliki tingkat efisiensi 10,13 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian anggaran ($108,14 - 97,54 = 10,60$) dan tingkat efektivitas 110,87 yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100 ($108,14/97,54*100 = 110,87$).

3. Analisis kinerja Tujuan 2: “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dengan target nilai sebesar 81,4 belum dapat diketahui capaiannya belum dapat diketahui disebabkan nilai dari hasil evaluasi APIP atas SAKIP pada tahun evaluasi belum dikeluarkan oleh inspektorat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,87	80,87	81,36	81,40	81,40	100,00	81,02	100,47

Hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 disampaikan melalui surat Inspektorat Daerah Kabupaten Demak Nomor 700/024/WIL III/Koi-Evaluasi/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memperoleh nilai 81,40 dengan predikat kinerja “A” (Memuaskan).

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah 80,36, mengalami peningkatan sebesar 1,00 menjadi 81,36. Ruang lingkup penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas dan kinerja internal. Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,20	26,10	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,40	24,00	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,25	11,26	12,00

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,50	20,00	22,00
Hasil Evaluasi		100%	80,36	81,36	81,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A	A

Hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya (2023) mengalami peningkatan sebesar 0,04 yaitu dari 81,36 menjadi 81,40 pada tahun 2024.

Hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak apabila dibandingkan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Demak tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak lebih tinggi 1,09 dibandingkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar yang memperoleh nilai hasil evaluasi sebesar 80,31.

Tabel 3. 15 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	81,40	81,40	100,00	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik triwulanan sebagai bahan pemantauan capaian kinerja organisasi, Pemanfaatan aplikasi e-sakip sebagai media monitoring data kinerja Penerapan reward dan punishment; Evaluasi kinerja dilakukan dengan memberikan rekomendasi upaya perbaikan manajemen kinerja;	Melakukan sinkronisasi data kinerja hasil pengumpulan internal data kinerja periodik dan verifikasi data kinerja yang dipublish pada esakip; menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan melakukan perbaikan serta dimanfaatkan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicapai melalui program dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 16 Program dan Anggaran Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
Jumlah		3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 1 (satu) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.746.280.497,00 dari target anggaran sebesar Rp3.789.239.200,00 dengan capaian realisasi anggaran 98,87%.

Adapun deskripsi tentang program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota: program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100,00	Menunjang: tersedianya SDM yang memadai; dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja; monitoring dan evaluasi kinerja

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Nilai SAKIP DPMPSTP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Sat uan	Kinerja			Keuangan			
				Tar get	Realis asi	Cap aian (%)	Program/ 8	Pagu Anggaran 9	Realisasi Anggaran 10	Capaian (%) 11
1	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	81, 40	81,40	100, 00	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate/ Kota	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
			Capaian			100, 00	Jumlah	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
TINGKAT EFISIENSI: 1,13										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 101,15										

Berdasarkan tabel diatas tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas belum bisa diketahui.

Berdasarkan tabel diatas Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tingkat efisiensi 1,13 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian anggaran ($100,00 - 98,87 = 1,13$) dan tingkat efektivitas 101,15 yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100 ($100,00/98,87*100 = 101,15$).

4. Analisis kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target mencapai **100,00%** dan termasuk predikat **“Sangat Tinggi”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis DPMPSTSP

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	85,71%	83,33%	100%	100%	100%	100	100,00	100,00

Untuk menghitung persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase Indikator Mencapai Target} = \left(\frac{\text{Jumlah Indikator yang Mencapai Target}}{\text{Total Jumlah Indikator}} \right) \times 100\%$$

Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 terealisasi 100% dengan capaian 66,67 dari target 100, sehingga tercapai dengan kriteria penilaian sedang, capaian yang kurang dari target dikarenakan terdapat 2 (dua) indikator yang nilai realisasinya belum rilis. Pada tahun 2023 terealisasi 100 meningkat 16,67 dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 83,33 dan meningkat 14,29 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang teralisasi sebesar 85,71. Pada tahun 2022 menurun 2,38 dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar 85,71. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2022 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra tahun 2026 telah mencapai 100,00% dari target 100,00% pada akhir Renstra.

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan

penanaman modal terealisasi 91,02 dengan capaian 100,02% persen dari target 91,00

- b. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dengan indikator 1) persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti terealisasi 100,00% dengan capaian 120,48% dari target 83,00%. 2) rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha terealisasi 1 hari dengan capaian 100,00% dari target 1 hari
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terealisasi 81,40 dengan capaian 100,00% dari target 81,40
- d. Meningkatnya penanaman modal daerah dengan indikator jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA terealisasi 2.059 proyek dengan capaian 117,66% dari target 1.750 proyek
- e. Meningkatnya nilai investasi dengan indikator persentase peningkatan investasi terealisasi 0,23% dengan capaian 575,00% dari target 0,04%.

Adapun faktor keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan pada indikator penunjang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 20 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPSTSP yang mencapai target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Sasaran 2: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	%	100	100	100,00	1) Penanganan tim pengaduan yang responsif 2) Pelayanan perizinan secara online 3) Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1) Koordinasi dan komunikasi dengan dinas instansi terkait 2) Kemudahan perizinan berusaha dan non berusaha

Sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target dicapai melalui program dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Program dan Anggaran Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPPTSP yang mencapai target

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
Jumlah		3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%

Sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target didukung oleh 1 (satu) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.746.280.497,00 dari target anggaran sebesar Rp3.789.239.200,00 dengan capaian realisasi anggaran 98,87%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota: program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPPTSP yang mencapai target

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Sasaran 2: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100,00	Menunjang: tersedianya SDM yang memadai; dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja; monitoring dan evaluasi kinerja

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP yang mencapai target

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 2: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	%	100,00	100,00	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
		Capaian				100,00	Jumlah	3.789.239.00	3.746.280.497	98,87%
TINGKAT EFISIENSI: 1,13										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 101,15										

Berdasarkan tabel diatas sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target memiliki tingkat efisiensi 1,13 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian anggaran ($100,00 - 98,87 = 1,13$) dan tingkat efektifitas 101,15 yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100 ($100,00/98,87*100 = 101,15$).

- Analisis kinerja Tujuan 3: “Meningkatkan Penanaman Modal Daerah” Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Penanaman Modal Daerah dengan indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA mencapai **117,66%** dan termasuk predikat **“Sangat Tinggi”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 24 Capaian Kinerja Tujuan 3:
Meningkatkan Penanaman Modal Daerah**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	431	519	1.676	1.750	2.059	117,66	2.357	87,36

Untuk mengukur jumlah realisasi proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2024, dapat menggunakan data yang dirilis oleh Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI). Indikator ini biasanya diukur dalam bentuk jumlah proyek yang direalisasikan serta nilai investasi yang telah dicapai. Adapun formulasi Jumlah realisasi PMA dan PMDN adalah Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun n.

Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 65.815 proyek. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 47,23% dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 43.080 proyek. mengalami peningkatan sebanyak 22.735 proyek dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 total proyek PMA dan PMDN hanya sebesar 19.374 proyek hal ini menandakan peningkatan dari tahun ketahun. Investasi di Jawa Tengah tahun 2024 didominasi oleh 3 (tiga) kabupaten kota dengan infrastruktur yang berkualitas tinggi diantaranya Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Batang.

Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA secara nasional tahun 2024 sebesar 312.514 proyek. Realisasi Proyek PMDN dan PMA tahun 2023 sebesar 337.620 proyek. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 80,24% dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2022 sebesar 260.955 proyek. Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 133.258 proyek.

Tabel 3. 25 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan 3: Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Proyek	1.750	2.059	117,66	Keberhasilan: 1) Pro investasi (kemudahan proses investasi), pemberian insentif dan kemudahan perizinan berusaha 2) Fasilitasi permasalahan/ hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal 3) Kegiatan Pengawasan dan pemantauan kegiatan usaha memastikan proyek investasi berjalan sesuai rencana. Penghambat:	1) Perda kabupaten demak nomor 3 tahun 2022 2) Menyediakan jalur komunikasi dan memastikan respon yang cepat bagi investor dalam penanganan permasalahan 3) Optimalisasi kegiatan pengawasan dan pemantauan penanaman modal

Tujuan Meningkatkan penanaman modal daerah dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA dicapai melalui program dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 26 Program dan Anggaran Indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	30.875.000	30.391.600	98,43

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2	Program Promosi Penanaman Modal	98.150.000	97.802.009	99,65
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	634.239.500	627.818.900	98,99
4	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	134.000.000	130.557.210	97,43
Jumlah		897.264.500	886.569.719	98,81

Tujuan meningkatkan penanaman modal daerah dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA didukung oleh 4 (empat) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp886.569.719,00 dari target anggaran sebesar Rp897.264.500,00 dengan capaian realisasi anggaran 98,81%.

Deskripsi tentang program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi investor dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat menghambat investasi, seperti birokrasi yang berbelit-belit atau regulasi yang tidak jelas.
- b. Program Promosi Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi yang tersedia di dalam negeri kepada investor lokal dan asing. Dalam rangka ini, pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan promosi, seperti pameran dagang atau kunjungan bisnis.
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan investasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung atau melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat
- d. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data terkait investasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di masa yang akan datang

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Meningkatkan penanaman modal daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Keterangan
1	Tujuan 3: Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	117,66	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	123,50	Menunjang: Penyusunan dokumen kebijakan peta potensi investasi; Penyediaan informasi regulasi investasi yang jelas	Data realisasi investasi LKPM s.d triwulan III, data realisasi triwulan IV masih dalam periode pelaporan oleh pelaku usaha
				Program Promosi Penanaman Modal	Rasio promosi terhadap jumlah investor	111,76	Menunjang: Kebijakan, kegiatan, dan intervensi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memastikan pelayanan publik yang efektif, serta memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat	Capaian s.d triwulan 3. Jumlah investor triwulan IV belum rilis/ masih dalam periode pelaporan oleh pelaku usaha (DO: Jumlah promosi yang dilaksanakan dibagi Jumlah investor yang masuk dikali 100%)
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	117,66	Menunjang: Monitoring dan pengawasan pelaksanaan investasi;	Data realisasi investasi LKPM s.d triwulan III, data realisasi triwulan IV masih dalam periode pelaporan oleh pelaku usaha

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Keterangan
				Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	107,33	Menunjang: Pengumpulan dan pengelolaan data terkait investasi untuk membantu dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan investasi yang akan datang	

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas **Tujuan Meningkatkan penanaman modal daerah** dengan indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Persentase Indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Sat ua n	Kinerja			Keuangan			
				Tar get	Reali sasi	Ca pai an (%)	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 3: Meningkatk an penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Pro yek	1.7 50	2.05 9	117 ,66	Program Pengemba ngan Iklim Penanama n Modal	30.875.000	30.391.600	98,43
							Program Promosi Penanama n Modal	98.150.000	97.802.009	99,65
							Program Pengendali an Pelaksanaa n Penanama n Modal	634.239.500	627.818.900	98,99
							Program Pengelolaa n Data Sistem Informasi Penanama n Modal	134.000.000	130.557.210	97,43

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Capaian					117,66	Jumlah	897.264.500	886.569.719	98,81
TINGKAT EFISIENSI: 18,85										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 119,08										

Berdasarkan tabel diatas **Tujuan Meningkatkan penanaman modal daerah** dengan indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA memiliki tingkat efisiensi 18,85 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian anggaran ($117,66 - 98,81 = 18,85$) dan tingkat efektivitas 119,08 yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100 ($117,66/98,81*100 = 119,08$).

6. Analisis kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Nilai Investasi”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Nilai Investasi** dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi mencapai 575,00% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Persentase peningkatan investasi	0,03	0,20	2,23	0,04	0,23	575,00	0,06	383,33

Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten Demak pada tahun 2024 terealisasi 0,23% dari target 0,04%. Realisasi tahun 2024 menurun sebesar 2,00 dibandingkan realisasi tahun 2023, dimana realisasi investasi tahun 2023 sebesar 2,23 yang merupakan capaian tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya turunnya capaian pada tahun 2024 disebabkan perubahan target kinerja pada Rencana Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Target Kinerja Tahun 2024 Dan 2025, Serta Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 Nomor 050/0649. Adapun Persentase peningkatan investasi menggunakan rumus jumlah

proyek tahun n dikurangi jumlah proyek tahun n-1 dibagi jumlah proyek tahun n-1 dikalikan 100%.

Persentase peningkatan investasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2024, Adapun faktor pendukung tingginya investasi di Kabupaten Demak diantaranya adalah:

- a. Pro Investasi (Kemudahan proses investasi pemberian insentif dan kemudahan dalam memperoleh perizinan)
- b. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas
- c. Kawasan Industri Jatengland
- d. Fasilitasi dan penyelesaian permasalahan dan hambatan bagi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- e. Bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

Persentase Peningkatan Investasi di Jawa Tengah tahun 2024 terealisasi 52,77% selisih 69,59% dari tahun 2023 yang mana pada tahun 2023 terealisasi 122,36%. Realisasi tahun 2023 meningkat 113,21% dibandingkan tahun sebelumnya dimana realisasi tahun 2022 sebesar -9,15% dan meningkat 40,28% dibandingkan tahun 2021 dimana realisasi tahun 2021 sebesar 82,08%.

Persentase Peningkatan Investasi secara nasional tahun 2024 terealisasi -7,44 selisih 36,81% dari tahun 2023 yang mana tahun 2023 terealisasi 29,38%. Realisasi tahun 2023 meningkat 66,45% dibandingkandari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2022 sebesar 95,83% dan meningkat 16,28% dibandingkan tahun 2021, dimana realisasi tahun 2021 sebesar - 13,10%.

Tabel 2. 8 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Solusi yang dilakukan pada Indikator persentase peningkatan investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Sasaran 3: Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,04	0,23	575,00	1) Kemudahan perizinan berusaha dan non berusaha secara online 2) Promosi dan branding daerah melalui kegiatan pameran	1) Mengintensifkan kegiatan promosi 2) Optimalisasi pengembangan sistem manajemen informasi terpadu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							3) Bimbingan teknis LKPM kepada pelaku usaha 4) Insentif retribusi 5) Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha 6) Pengelolaan data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan guna mengambil keputusan	

Sasaran Meningkatnya nilai investasi dengan indikator Persentase peningkatan investasi dicapai melalui program dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 30 Program dan Anggaran Indikator Persentase Peningkatan Investasi

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	30.875.000	30.391.600	98,43
2	Program Promosi Penanaman Modal	98.150.000	97.802.009	99,65
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	634.239.500	27.818.900	98,99
4	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	134.264.500	130.557.210	98,81
Jumlah		897.264.500	886.569.719	98,81

Sasaran Meningkatnya nilai investasi dengan indikator Persentase peningkatan investasi didukung oleh 4 (empat) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp886.569.719,00 dari target anggaran sebesar Rp897.264.500,00 dengan capaian realisasi anggaran 98,81%.

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi investor dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat

menghambat investasi, seperti birokrasi yang berbelit-belit atau regulasi yang tidak jelas.

- b. Program Promosi Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi yang tersedia di dalam negeri kepada investor lokal dan asing. Dalam rangka ini, pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan promosi, seperti pameran dagang atau kunjungan bisnis.
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan investasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung atau melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat
- d. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data terkait investasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di masa yang akan datang.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 31 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan Meningkatkan penanaman modal daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang	Keterangan
1	Sasaran 3: Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan investasi	575,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	123,50	Menunjang: Penyusunan dokumen kebijakan peta potensi investasi; Penyediaan informasi regulasi investasi yang jelas	Data realisasi investasi LKPM s.d triwulan III, data realisasi triwulan IV masih dalam periode pelaporan oleh pelaku usaha
				Program Promosi Penanaman Modal	Rasio promosi terhadap jumlah investor	111,76	Menunjang: Kebijakan, kegiatan, dan intervensi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memastikan	Capaian s.d triwulan 3. Jumlah investor triwulan IV belum rilis/ masih dalam periode pelaporan oleh pelaku usaha.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Keterangan
							elayanan publik yang efektif, serta memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat	(DO: Jumlah promosi yang dilaksanakan dibagi Jumlah investor yang masuk dikali 100%)
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	117,66	Menunjang: Monitoring dan pengawasan pelaksanaan investasi;	Data realisasi investasi LKPM s.d triwulan III, data realisasi triwulan IV masih dalam periode pelaporan oleh pelaku usaha
				Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	107,33	Menunjang: Pengumpulan dan pengelolaan data terkait investasi untuk membantu dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan investasi yang akan datang	

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas Sasaran Meningkatkan nilai investasi dengan indikator persentase peningkatan investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 32 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator
Persentase peningkatan nilai investasi**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Sat uan	Kinerja			Keuangan			
				Tar get	Realis asi	Cap aian (%)	Program/ Program/	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 3: Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,04	0,23	575, 00	Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal	30.875.000	30.391.600	98,43
							Program Promosi Penanaman Modal	98.150.000	97.802.009	99,65
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	634.239.500	627.818.900	98,99
							Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	134.000.000	30.557.210	97,43
						575, 00	Jumlah	897.264.00	886.569.719	98,81
Capaian						575, 00	Jumlah	897.264.00	886.569.719	98,81
TINGKAT EFISIENSI: 476,19										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 581,94										

Berdasarkan tabel diatas sasaran meningkatnya nilai investasi dengan indikator persentase peningkatan investasi memiliki tingkat efisiensi 476,19 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian anggaran ($575,00 - 98,81 = 476,19$) dan tingkat efektivitas 581,94 yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100 ($575,00/98,81*100 = 581,94$).

Secara rinci capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan perbandingan capaian anggaran program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 33 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Seluruh Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Sat uan	Kinerja			Keuangan			
				Tar get	Realis asi	Cap aian (%)	Program/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Ang ka	91	91,02	100, 02	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupate/ Kota	2.535.463.500	2.472.588.888	97,52%
							Program Pelayanan Penanaman Modal	141.555.000	138.530.606	97,86%
Rata-Rata Capaian						100, 02	Jumlah	2.677.018.500	2.611.119.494	97,54%
TINGKAT EFISIENSI: 2,48										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 102,54										
2	Sasaran 1: Terwujud nya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	83	100	120, 48	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	2.535.463.500	2.472.588.888	97,52%
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	Hari	1	1	100	Program Pelayanan Penanaman Modal	141.555.000	138.530.606	97,86%
Rata-Rata Capaian						110, 24	Jumlah	2.677.018.500	2.611.119.494	97,54%
TINGKAT EFISIENSI: 12,70										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 113,02										
3	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	81, 40	81,40	100, 00	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupate/ Kota	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
Rata-Rata Capaian						100, 00	Jumlah	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
TINGKAT EFISIENSI: 1,13										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 101,15										

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Sat uan	Kinerja			Keuangan			
				Tar get	Realis asi	Cap aian (%)	Program/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Sasaran 2: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	%	100, 00	100, 00	100, 00	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupate/ Kota	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87%
Rata-Rata Capaian						100, 00	Jumlah	3.789.239.00	3.746.280.497	98,87%
TINGKAT EFISIENSI: 1,13										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 101,15										
5	Tujuan 3: Meningkatka n penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Proy ek	1.75 0	2.059	117, 66	Program Pengemban gan Iklim Penanaman Modal	30.875.000	30.391.600	98,43
							Program Promosi Penanaman Modal	98.150.000	97.802.009	99,65
							Program Pengendalia n Pelaksanaa n Penanaman Modal	634.239.500	627.818.900	98,99
							Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	134.000.000	130.557.210	97,43
Rata-Rata Capaian						117, 66	Jumlah	897.264.500	886.569.719	98,81
TINGKAT EFISIENSI: 18,85										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 119,08										
6	Sasaran 3: Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,04	0,23	575, 00	Program Pengemban gan Iklim Penanaman Modal	30.875.000	30.391.600	98,43
							Program Promosi Penanaman Modal	98.150.000	97.802.009	99,65

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	634.239.500	627.818.900	98,99
							Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	134.000.000	30.557.210	97,43
Rata-Rata Capaian						575,00	Jumlah	897.264.00	886.569.719	98,81
TINGKAT EFISIENSI: 476,19										
TINGKAT EFEKTIFITAS: 581,94										

Ketercapaian Indikator pada tujuan/sasaran ini didukung dengan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Subkegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	2024			Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	91	91,02	100,02	97,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.535.463.500	2.472.588.888	97,52
	Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	83	100	120,48	105,26	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.295.500	13.001.250	97,79
								Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	13.295.500	13.001.250	97,79
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.400.000	168.738.000	99,61
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.400.000	48.906.000	99,00
								Pendidikan dan pelatihan pegawai	120.000.000	119.832.000	99,86

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	2024			Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								berdasarkan tugas dan fungsi			
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.112.900	345.844.777	97,12
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.673.500	12.480.000	98,47
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.020.500	61.319.000	97,30
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	39.248.000	98,12
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61.250.000	54.675.000	89,27
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.750.000	3.750.000	100,00
								Fasilitas Kunjungan Tamu	1.020.000	990.000	97,06
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.198.900	160.470.177	99,55
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.200.000	12.912.600	97,82
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.113.704.500	1.096.056.350	98,42
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.000.000	480.000.000	98,36
								Pengadaan Mebel	169.156.500	164.940.000	97,51
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.800.000	129.950.000	97,85
								Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	53.412.000	51.600.000	96,61

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	2024			Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya	270.336.000	269.566.350	99,72
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.300.000	146.970.304	84,81
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	100,00
								Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	143.670.304	84,51
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.650.600	701.978.207	98,92
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	52.327.500	51.920.207	99,22
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.965.100	62.164.000	94,24
								Pemeliharaan Mebel	35.000.000	34.281.000	97,95
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000	27.400.000	96,48
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.800.000	299.975.000	99,73
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.158.000	26.706.000	98,34

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	2024			Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000	199.532.000	99,77
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	Hari	1	1	100	150,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	141.555.000	138.530.606	97,86
								Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	141.555.000	138.530.606	97,86
								Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	111.004.000	108.425.006	97,68
								Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	19.663.000	19.337.500	98,34
								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	10.888.000	10.768.100	98,90
2	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	81,4	81,4	100,00	100,47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	2024			Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran 2: Meningkatkan capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.724.239.200	3.686.033.897	98,97
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.459.815.700	3.424.014.863	98,97
								Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi	264.423.500	262.019.034	99,09
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	60.246.600	92,69
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	13.992.500	93,28
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	6.964.500	92,86
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	6.848.500	91,31
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	32.441.100	92,69
3	Tujuan 3: Meningkatkan penanaman modal daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Proyek	1.750	2.059	117,66	87,36	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	30.875.000	30.391.600	98,43
	Sasaran 3: Meningkatkan nilai investasi	Persentase Peningkatan Investasi		0,04	0,23	575,00	383,33	Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/ kota	30.875.000	30.391.600	98,43
								Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	30.875.000	30.391.600	98,43
								PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	98.150.000	97.802.009	99,65

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	2024			Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ kota	98.150.000	97.802.009	99,65
								Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	98.150.000	97.802.009	99,65
								PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	634.239.500	627.818.900	98,99
								Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota	634.239.500	627.818.900	98,99
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	92.062.000	90.589.850	98,40
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330.751.500	328.450.100	99,30
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	211.426.000	208.778.950	98,75
								PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	134.000.000	130.557.210	97,43
								Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ kota	134.000.000	130.557.210	97,43

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	2024			Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	134.000.000	130.557.210	97,43
Total									7.363.522.200	7.243.969.710	98,38

Sumber : Data Realisasi kinerja program dan kegiatan DPMPSTSP tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa guna mencapai tujuan (1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal. (2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Meningkatkan penanaman modal daerah yang diukur dengan indikator Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA dan sasaran (1) Terwujudnya Pelayanan publik yang responsive, dengan 2 (dua) indikator yaitu: (a). Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti; (b). Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha;(2) Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;(3) Meningkatnya Nilai Investasi, dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi. Didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Ketercapaian program ini untuk mencapai Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% terealisasi 100% dan persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini ditempuh melalui 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub

kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.324.702.700,00 dan terealisasi sebesar Rp6.218.869.385,00 dengan capaian 98,33, dengan kegiatan dan sub kegiatan berupa:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.000.000,00 terealisasi Rp60.246.600,00 dengan capaian 92,69 , terdiri dari sub kegiatan:
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi Rp13.992.500,00 dengan capaian 93,28.
 - 2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000,00 terealisasi Rp6.964.500,00 dengan capaian 92,86 .
 - 3). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000,00 terealisasi Rp6.848.500,00 dengan capaian 91,31.
 - 4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi Rp32.441.100,00 dengan capaian 92,69.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.724.239.200,00 terealisasi Rp3.686.033.897,00 dengan capaian 98,97, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.459.815.700,00 terealisasi sebesar Rp3.424.014.863,00 dengan capaian 98,97;
 - 2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp264.423.500,00 terealisasi sebesar Rp262.019.034,00 dengan capaian 99,09.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.295.500,00 terealisasi sebesar Rp13.001.250,00 dengan capaian 97,79 terdiri dari sub kegiatan:
 - 1). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp13.295.500,00 terealisasi sebesar Rp13.001.250,00 dengan capaian 97,79.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp169.400.000,00 terealisasi sebesar Rp168.738.000,00 dengan capaian 99,61 terdiri dari sub kegiatan:
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp49.400.000,00 terealisasi sebesar Rp48.906.000,00 dengan capaian 99,00.
 - 2). Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp119.832.000,00 dengan capaian 99,86.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp356.112.900,00 terealisasi sebesar Rp345.844.777,00 dengan capaian 97,12 terdiri dari sub kegiatan:
 - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp12.673.500,00 terealisasi sebesar Rp12.480.000,00 dengan capaian 98,47;
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp63.020.500,00 terealisasi Rp61.319.000,00 dengan capaian 97,30;
 - 3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi Rp39.248.000,00 dengan capaian 98,12;
 - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp61.250.000,00 terealisasi Rp54.675.000,00 dengan capaian 89,27;
 - 5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan, dengan anggaran Rp3.750.000,00 terealisasi Rp3.750.000,00 dengan capaian 100;
 - 6). Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.020.000,00 terealisasi Rp990.000,00 dengan capaian 97,06.
 - 7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp161.198.900,00 terealisasi Rp160.470.177,00 dengan capaian 99,55.
 - 8). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp13.200.000,00 terealisasi Rp12.912.600,00 dengan capaian 97,82.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp143.001.200,00 terealisasi sebesar Rp133.470.000,00 dengan capaian 93,33 dengan sub kegiatan:
 - 1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp488.000.000,00 terealisasi Rp480.000.000,00 dengan capaian 98,47.
 - 2) Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp169.156.500,00 terealisasi sebesar Rp164.940.000,00 dengan capaian 97,51;
 - 3). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp132.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 129.950.000,00 dengan capaian 97,85;
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp53.412.000,00 terealisasi sebesar Rp51.600.000,00 dengan capaian 96,61;
 - 5) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 270.336.000,00 terealisasi sebesar Rp269.566.350,00 dengan capaian 99,72.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.300.000,00 terealisasi sebesar Rp146.970.304,00 dengan capaian 84,81 dengan sub kegiatan:
 - 1). Persediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp 3.300.000,00 terealisasi sebesar Rp3.300.000,00 dengan capaian 100;
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp143.670.304,00 dengan capaian 84,51.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp709.650.600,00 terealisasi sebesar Rp701.978.207,00 dengan capaian 98,92 dengan sub kegiatan:

- 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan anggaran sebesar Rp52.327.500,00 terealisasi Rp51.920.207,00 dengan capaian 99,22;
- 2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan anggaran sebesar Rp65.965.100,00 terealisasi Rp62.164.000,00 dengan capaian 94,24;
- 3). Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi Rp34.281.000,00 dengan capaian 97,95;
- 4). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp28.400.000,00 terealisasi sebesar Rp27.400.000,00 dengan capaian 96,48;
- 5). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp300.800.000,00 terealisasi Rp299.975.000,00 dengan capaian 99,73;
- 6). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp27.158.000,00 terealisasi Rp26.706.000,00 dengan capaian 98,34.
- 7). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi Rp199.532.000,00 dengan capaian 9,77.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Ketercapaian program ini untuk meningkatkan Jumlah nilai Investasi (PMDN/PMA) dengan target Rp3.200.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.952.120.006.915,00 dengan capaian 123,50. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.391.600,00 dengan capaian 98,43, dengan kegiatan dan sub kegiatan berupa:

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp30.875.000,00 terealisasi sebesar Rp30.391.600,00 dengan capaian 98,43 dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp30.875.000,00 dan terealisasi Rp30.391.600,00 dengan capaian 98,43.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Ketercapaian program ini untuk mengetahui rasio promosi terhadap jumlah investor dengan target 0,17 terealisasi 0,15 dengan capaian 111,76. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.150.000,00 terealisasi sebesar Rp97.802.009,00 dengan capaian 99,65, dengan kegiatan dan sub kegiatan berupa:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ kota, dengan anggaran sebesar Rp98.150.000,00 terealisasi sebesar Rp97.802.009,00 dengan capaian 99,65 dengan sub kegiatan:
 - 1). Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp98.150.000,00 terealisasi sebesar Rp97.802.009,00 dengan capaian 99,65.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Ketercapaian program ini untuk meningkatkan Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar (ketetapan) dengan target 6.750 ketetapan terealisasi 3.800 ketetapan. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp141.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp138.530.606,00 dengan capaian 97,86, dengan kegiatan dan sub kegiatan berupa:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp141.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp138.530.606,00 dengan capaian 97,86 dengan dengan sub kegiatan :
 - 1). Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan bersaha terintegrasi secara elektronik, dengan anggaran sebesar Rp111.004.000,00 terealisasi Rp108.425.006,00 dengan capaian 97,68.
 - 2). Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Resiko, dengan anggaran sebesar

Rp19.663.000,00 terealisasi Rp19.337.500,00 dengan capaian 98,34.

- 3). Pemantauan, Analisis, Evaluasi pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dengan anggaran Rp10.888.000,00 terealisasi sebesar Rp10.768.100,00 dengan capaian 98,90.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Ketercapaian program ini untuk meningkatkan Jumlah investor (PMDN/PMA) dengan target 1.750 proyek/investor terealisasi sebesar 2.059 proyek dengan capaian 117,66. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp634.239.500,00 dan terealisasi sebesar Rp627.818.900,00 dengan capaian 98,99. Adapun kegiatan dan sub kegiatan berupa:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp634.239.500,00 dan terealisasi sebesar Rp627.818.900,00 dengan capaian 98,99 dengan sub kegiatan:
 - 1). Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan Usahanya, dengan anggaran sebesar Rp92.062.000,00 terealisasi sebesar Rp90.589.850,00 dengan capaian 98,40;
 - 2). Bimbingan Tehnis Kepada Pelaku Usaha, dengan anggaran sebesar Rp330.751.500,00 terealisasi sebesar Rp328.450.100,00 dengan capaian 99,30;
 - 3). Pengawasan Penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp211.426.000,00 terealisasi sebesar Rp208.778.950,00 dengan capaian 98,75.

6. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal

Ketercapaian program ini untuk meningkatkan jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial dengan target 300 data terealisasi 322 data. Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp134.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.557.210,00 dengan capaian 97,43, dengan kegiatan dan sub kegiatan berupa:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp134.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.557.210,00 dengan capaian 97,43 dengan sub kegiatan:

- 1). Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan anggaran Rp134.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.557.210,00 dengan capaian 97,43.

Adapun secara rinci capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung tampak pada tabel berikut:

Tabel 3. 35 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Dana	Capaian (%)	Indikator Kinerja Outcome (Program) / Output (Kegiatan / subkegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.789.239.200	3.746.280.497	98,87	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	60.246.600	92,69	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (dokumen)	8 dokumen	8 dokumen
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	13.992.500	93,28	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000	6.964.500	92,86	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	6.848.500	91,31	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	32.441.100	92,69	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.724.239.200	3.686.033.897	98,97	Jumlah laporan keuangan (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.459.815.700	3.424.014.863	98,97	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/ bulan	27 orang/ bulan
2.2	Penyediaan Administrasi	264.423.500	262.019.034	99,09	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 dokumen	10 dokumen

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Dana	Capaian (%)	Indikator Kinerja Outcome (Program) / Output (Kegiatan / subkegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Tugas ASN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.535.463.500	2.472.588.888	97,52	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.295.500	13.001.250	97,79	Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah yang sudah direkon siliasi (laporan)	2 laporan	2 laporan
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	13.295.500	13.001.250	97,79	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.400.000	168.738.000	99,61	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.400.000	48.906.000	99,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	1 paket
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	120.000.000	119.832.000	99,86	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	38 orang	38 orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.112.900	345.844.777	97,12	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.673.500	12.480.000	98,47	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.020.500	61.319.000	97,30	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	39.248.000	98,12	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket
5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61.250.000	54.675.000	89,27	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.750.000	3.750.000	100,00	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	30 dokumen	30 dokumen
5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.020.000	990.000	97,06	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.198.900	160.470.177	99,55	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	135 laporan	145 laporan
5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.200.000	12.912.600	97,82	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4250 dokumen	4250 dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.113.704.500	1.096.056.350	98,42	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	149 unit	149 unit

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Dana	Capaian (%)	Indikator Kinerja Outcome (Program) / Output (Kegiatan / subkegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.000.000	480.000.000	98,36	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	2 unit
6.2	Pengadaan Mebel	169.156.500	164.940.000	97,51	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	135 unit	135 unit
6.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	132.800.000	129.950.000	97,85	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	6 unit
6.4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	53.412.000	51.600.000	96,61	Jumlah unit sarana dan prasarana gedungkantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit
6.5	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	270.336.000	269.566.350	99,72	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.300.000	146.970.304	84,81	Jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	100,00	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	143.670.304	84,51	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.650.600	701.978.207	98,92	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)	71 unit	141 unit
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	52.327.500	51.920.207	99,22	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.965.100	62.164.000	94,24	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit
	Pemeliharaan Mebel	35.000.000	34.281.000	97,95	Jumlah mebel yang dipelihara	19 unit	62 unit
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000	27.400.000	96,48	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 unit	42 unit

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Dana	Capaian (%)	Indikator Kinerja Outcome (Program) / Output (Kegiatan / subkegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.800.000	299.975.000	99,73	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.158.000	26.706.000	98,34	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 unit	13 unit
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000	199.532.000	99,77	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit
II	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	141.555.000	138.530.606	97,86	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	6.750 pelaku usaha	3.800 pelaku usaha
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	141.555.000	138.530.606	97,86	Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	6.750 pelaku usaha	3.800 pelaku usaha
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan bersaha terintegrasi secara elektronik	111.004.000	108.425.006	97,68	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Terintegrasi secara Elektronik	6.750 pelaku usaha	3.800 pelaku usaha
1.2	Pemantauan, Analisis, Evaluasi pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	10.888.000	10.768.100	98,90	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	40 kegiatan usaha	43 kegiatan usaha
1.3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Risiko	19.663.000	19.337.500	98,34	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	5 orang	13 orang
III	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	30.875.000	30.391.600	98,43	Jumlah nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp.3.200.000.000.000	Rp3.952.120.006.915
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	30.875.000	30.391.600	98,43	Jumlah potensi investasi yang diterbitkan (dokumen)	174 dokumen	174 dokumen
1.2	Penyusunan peta potensi kabupaten/kota	30.875.000	30.391.600	98,43	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	174 dokumen	174 dokumen

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Dana	Capaian (%)	Indikator Kinerja Outcome (Program) / Output (Kegiatan / subkegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	98.150.000	97.802.009	99,65	Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,17	0,15
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ kota	98.150.000	97.802.009	99,65	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan (laporan)	3 laporan	3 laporan
1.1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/ Kota	98.150.000	97.802.009	99,65	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 dokumen	3 dokumen
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	634.239.500	627.818.900	98,99	Jumlah investor (PMDN/PMA) (proyek)	1.750 proyek/ investor	2.059 proyek/ investor
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota	634.239.500	627.818.900	98,99	Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	9%	15,15%
1.1	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan Usahanya	92.062.000	90.589.850	98,40	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	25 kegiatan usaha	196 kegiatan usaha
1.2	Bimbingan Tehnis Kepada Pelaku Usaha	330.751.500	328.450.100	99,30	Jumlah pealku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	200 pelaku usaha	600 pelaku usaha
1.3	Pengawasan Penanaman Modal	211.426.000	208.778.950	98,75	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	50 kegiatan usaha	312 kegiatan usaha
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	134.000.000	130.557.210	97,43	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial (data)	300 data	322 data
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada	134.000.000	130.557.210	97,43	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia (data)	102 dokumen	115 dokumen

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Dana	Capaian (%)	Indikator Kinerja Outcome (Program) / Output (Kegiatan / subkegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
	tingkat daerah Kabupaten/kota						
1.1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	134.000.000	130.557.210	97,43	Jumlah data dan informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	102 dokumen	115 dokumen
TOTAL		7.363.522.200	7.243.969.710	98,38			

Sumber data: DPMPTSP data diolah 2024

Pada tahun 2024, Ketercapaian 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak di dukung oleh 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) subkegiatan, dengan realisasi belanja 98,38.

3.3 Realisasi Anggaran

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran diatas. Adapun total anggaran murni sebesar Rp6.631.504.364,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), setelah perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp732.017.836,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp7.363.522.200,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), Anggaran bersumber dari dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp6.779.639.200,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dan DAK Non Fisik fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp583.883.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dialokasikan pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Realisasi anggaran belanja apabila diperinci dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.324.702.700	6.218.869.385	98,33
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	60.246.600	92,69
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	13.992.500	93,28
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000	6.964.500	92,86
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	7.500.000	6.848.500	91,31
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	32.441.100	92,69
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.724.239.200	3.686.033.897	98,97
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.459.815.700	3.424.014.863	98,97
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.423.500	262.019.034	99,09
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.295.500	13.001.250	97,79
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	13.295.500	13.001.250	97,79
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.400.000	168.738.000	99,61
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.400.000	48.906.000	99,00
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	120.000.000	119.832.000	99,86
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.112.900	345.844.777	97,12
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.673.500	12.480.000	98,47
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.020.500	61.319.000	97,30
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	39.248.000	98,12
5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61.250.000	54.675.000	89,27
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.750.000	3.750.000	100,00
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.020.000	990.000	97,06

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.198.900	160.470.177	99,55
5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.200.000	12.912.600	97,82
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.113.704.500	1.096.056.350	98,42
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.000.000	480.000.000	98,36
6.2	Pengadaan Mebel	169.156.500	164.940.000	97,51
6.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	132.800.000	129.950.000	97,85
6.4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	53.412.000	51.600.000	96,61
6.5	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	270.336.000	269.566.350	99,72
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.300.000	146.970.304	84,81
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	100,00
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	143.670.304	84,51
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.650.600	701.978.207	98,92
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	52.327.500	51.920.207	99,22
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.965.100	62.164.000	94,24
8.3	Pemeliharaan Mebel	35.000.000	34.281.000	97,95
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000	27.400.000	96,48
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.800.000	299.975.000	99,73
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.158.000	26.706.000	98,34
8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000	199.532.000	99,77
II	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	141.555.000	138.530.606	97,86

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	141.555.000	138.530.606	97,86
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan bersaha terintegrasi secara elektronik	111.004.000	108.425.006	97,68
1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Resiko	19.663.000	19.337.500	98,34
1.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	10.888.000	10.768.100	98,90
III	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	30.875.000	30.391.600	98,43
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	30.875.000	30.391.600	98,43
1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	30.875.000	30.391.600	98,43
IV	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	98.150.000	97.802.009	99,65
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	98.150.000	97.802.009	99,65
1.1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	98.150.000	97.802.009	99,65
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	634.239.500	627.818.900	98,99
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota	634.239.500	627.818.900	98,99
1.1	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan Usahanya	92.062.000	90.589.850	98,40
1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Resiko	330.751.500	328.450.100	99,30
1.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	211.426.000	208.778.950	98,75
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	134.000.000	130.557.210	97,43

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/kota	134.000.000	130.557.210	97,43
1.1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	134.000.000	130.557.210	97,43
TOTAL		7.363.522.200	7.243.969.710	98,38

Sumber: LRA Dpmpmsp tahun 2024

3.4 INOVASI DPMPSTP KABUPATEN DEMAK

Untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sejak berdirinya telah melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yaitu:

1. Sistem Informasi Naskah Dinas Kabupaten Demak (SI NADIN)

Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Kabupaten Demak (Si Nadin) adalah aplikasi pengelolaan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang terintegrasi untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah secara elektronik.

2. Sistem Infomasi Investasi Daerah Online Kabupaten Demak (Si INVEST)

Aplikasi Sistem Infomasi Investasi Daerah Online Kabupaten Demak (Si INVEST) adalah aplikasi pengelolaan proses pengurusan perizinan berusaha di daerah yang menjadi komitmen bagi investor pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Dengan Aplikasi Ini Proses Pengajuan Perizinan Daerah Menjadi Lebih Cepat Karena Pemohon (Investor) Izin Dapat Langsung Mengakses Aplikasi Dengan Melakukan Pendaftaran Dan Aktivasi Akun Secara Online.

3. Online Payment System Terintegrasi (OPS GAS)

Online Payment System Terintegrasi adalah system pembayaran retribusi daerah secara online dan bekerjasama dengan BANK JATENG.

4. Cetak Izin Mandiri

Cetak izin mandiri merupakan pengembangan dari aplikasi SI Invest Oke, setelah proses permohonan izin disetujui atau di (Tanada Tangan Elektronik) TTE oleh Kepala Dinas maka pemohon bisa mencetak izin secara mandiri di aplikasi SI Invest.

5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Online

Pemohon yang telah mengajukan permohonan izin secara online melalui SI Invest bisa melakukan penilaian pelayanan melalui website yang telah disediakan sebelum mencatak perizinan secara mandiri. Laporan bisa dilihat dan di download sesuai kebutuhan.

6. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Teknis Mal Pelayanan Publik. Tujuan dari diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Demak yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengintegrasikan berbagai layanan yang meliputi berbagai instansi pemerintah kabupaten demak, serta bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Adapun pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) tujuan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal tercapai 100,02%, Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai 116,28%, Rata-Rata Lama Pengurusan Perizinan Berusaha tercapai 100,00%, Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercapai 100,00%, Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target tercapai 100,00%, Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA tercapai 117,66%, Persentase Peningkatan Investasi tercapai 575,00%.
2. Berdasarkan hasil efisiensi dan efektifitas dari 3 (tiga) tujuan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator didapat bahwa 7 (tujuh) indikator telah efisien.
3. Alokasi anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.363.522.200,00 terdiri dari 6 (enam) Program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan terealisasi sebesar Rp7.243.969.710,00 atau 98,38%.
4. Target pendapatan Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebesar Rp11.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.007.844.194,00,00 atau 181,89% dari target yang ditetapkan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran strategis ini adalah

- a) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan perizinan secara online untuk mempermudah dan mempercepat perizinan;
- b) Adanya Dukungan pendampingan pengoperasian aplikasi SI INVEST dan OSS RBA dalam pelayanan perizinan;
- c) Adanya Mal Pelayanan Publik.

Beberapa hal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tujuan/sasaran strategis antara lain:

- 1) Masih terbatasnya potensi investasi yang ada;
Kegiatan yang mendukung tersedianya Potensi investasi dalam satu tahun hanya satu kali kegiatan, sehingga potensi investasi yang ada belum semuanya tersajikan dengan baik dalam bentuk buku/dokumen.
- 2) Masih terbatasnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan oleh bidang pengendalian, pengawasan dan penindakan secara berkala namun karena keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia sehingga pelaksanaannya belum maksimal.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal;
Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan mengikuti kegiatan pameran di tingkat lokal, regional dan nasional yang masing – masing direncanakan satu kali keikutsertaan setiap tahun, tetapi dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas tidak dapat mengikuti sesuai yang direncanakan setiap tahun.
- 4) Belum optimalnya pengolahan dan penyajian data penanaman modal;
Dengan adanya peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, maka pengembangan secara terus menerus system teknologi informasi pengelolaan dan penyajian data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sangat dibutuhkan guna mewujudkan pengelolaan dan penyajian data dan informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan dan penyajian data penanaman modal serta sarana dan prasarana

pendukung mengakibatkan kurang optimalnya pengolahan dan penyajian data penanaman modal.

Strategi/upaya yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja adalah :

5. Mengoptimalkan potensi investasi yang ada;
Optimalisasi potensi investasi dilakukan dengan cara memanfaatkan media lain selain buku/ dokumen, diantaranya melalui media elektronik.
6. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Optimalisasi Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memberdayakan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada dengan melibatkan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan promosi penanaman modal;
Optimalisasi penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan cara melakukan seleksi event pameran yang akan diikuti dan melakukan promosi melalui media elektronik.
8. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian data penanaman modal.
Optimalisasi pengelolaan dan penyajian data penanaman modal dilakukan dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada; memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, serta mengelola Sistem Informasi yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Demak, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Des. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 197106021992031005